

Di Balik Pertarungan Wacana: Membongkar Narasi Tersembunyi Penundaan Peresmian Danantara

ANDIVA SADA RIFANA SARASWATI & AGUSTINUS RUSDIANTO BERTO

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, Banten, Indonesia

Email: agustinus.berto@umn.ac.id

Abstrak

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan investasi dan memperkuat perekonomian nasional. Peresmian BPI Danantara yang semula dijadwalkan pada 8 November 2024 batal dilaksanakan dan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan penundaan tersebut menuai beragam tanggapan, baik pro maupun kontra dari para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perdebatan wacana penundaan peresmian BPI Danantara yang tercipta di antara pemangku kepentingannya dan mengungkap aktor-aktor utama yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, pemetaan akan dilakukan menggunakan metode Analisis Jaringan Wacana berdasarkan tinjauan teori Kerangka Koalisi Wacana. Pengumpulan data dilakukan terhadap 35 artikel pemberitaan dari 22 media daring nasional dalam rentang waktu 6-20 November 2024. Artikel-artikel tersebut dikoding secara kualitatif berdasarkan tema-tema wacana yang terbentuk, kemudian dipetakan secara kuantitatif dalam pengukuran jaringan wacana dan jaringan aktor. Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik yang tampak dalam beberapa bentuk jaringan wacana, aktor, jaringan konsep, dan jaringan afiliasi. Pertama adalah jaringan aktor, yaitu ditemukan adanya aktor utama yang pro terhadap wacana penundaan peresmian BPI Danantara yang mampu menghubungkan berbagai koalisi aktor yang pro dan kontra terhadap wacana tersebut. Kedua pada jaringan konsep, yakni ditemukan adanya narasi utama yang cenderung pro terhadap wacana penundaan peresmian BPI Danantara yang mampu menghubungkan berbagai koalisi aktor-aktor yang pro dan kontra. Terakhir adalah jaringan afiliasi, yaitu sebagian besar koalisi-koalisi wacana yang terbentuk cenderung pro terhadap wacana penundaan peresmian BPI Danantara di mana aktor-aktor utama di dalamnya saling terhubung satu sama lain secara kohesif dalam sebuah narasi utama. Sementara aktor-aktor yang berkoalisi dalam wacana yang kontra terhadap wacana penundaan peresmian BPI Danantara tidak saling terhubung satu sama lain, tetapi justru mampu mengidentifikasi suatu wacana yang memuat potensi aktor yang akan menjadi kandidat pengelola BPI Danantara ke depannya. Untuk itu penelitian ke depannya perlu mendalami keterkaitan antara aktor-aktor utama dengan kerangka koalisi advokasi, terutama aktor-aktor yang berpotensi mengisi struktur pengelola BPI Danantara mendatang.

Kata Kunci: Analisis Jaringan Wacana; Danantara; Kerangka Koalisi Wacana

Abstract

The establishment of the Nusantara Anagata Investment Management Agency (BPI Danantara) is part of the government's effort to maximize investment management and strengthen the national economy. The inauguration of BPI Danantara, which was initially scheduled for November 8, 2024, was canceled and postponed to an undetermined date. This postponement policy received mixed responses, both supportive and critical, from stakeholders. This study aims to map the discourse debate surrounding the postponement of BPI Danantara's inauguration and to identify the key actors involved. To achieve this, the mapping was conducted using Discourse Network Analysis (DNA), based on the theoretical lens of the Discourse Coalition Framework (DCF). Data were collected from 35 news articles published by 22 national online media outlets between November 6-20, 2024. These articles were qualitatively coded based on emerging discourse themes and then quantitatively mapped into discourse networks and actor networks. The study presents several noteworthy findings, reflected in three types of networks: actor networks, concept networks, and affiliation networks. First, in the actor network, it was found that there are key actors supporting the postponement of BPI Danantara's inauguration who are able to bridge different actor coalitions, both pro and contra. Second, in the concept network, a dominant narrative in favor of the postponement was identified, which successfully linked various pro and contra actor coalitions. Finally, in the affiliation network, most of the discourse coalitions that formed tended to support the postponement, with their key actors cohesively connected through a shared central narrative. In contrast, actors who opposed the postponement were not interconnected with each other but were able to identify a discourse highlighting potential candidates who might become part of BPI Danantara's future management structure. Therefore, further research needs to explore the linkages between these key actors and the advocacy coalition framework, particularly actors who are likely to occupy roles in the future organizational structure of BPI Danantara.

Keywords: Danantara; Discourse Coalition Framework; Discourse Network Analysis

CoverAge

Journal of Strategic
Communication

Vol. 16, No. 1, Hal.115-137

September 2025.

Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Pancasila

Accepted August 14, 2025

Revised August 21, 2025

Approved September 11, 2025

PENDAHULUAN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) adalah badan pengelola investasi strategis yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai wadah pengelolaan investasi strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkualitas. Nama "Daya Anagata Nusantara" memiliki makna, "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia (danantaraindonesia.com, 2025).

BPI Danantara bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global melalui pendekatan investasi berbasis non-APBN, pengelolaan korporasi berskala internasional, dan tata kelola yang baik. Lembaga ini berperan sebagai katalis investasi nasional dengan mengintegrasikan sumber daya dari beberapa BUMN besar dan menggunakan model kerja mirip *Sovereign Wealth Fund* (SWF) seperti Temasek dari Singapura demi menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif dan berkelanjutan (Fikri, 2024). Rencana pembentukan badan ini yang telah diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 8 November 2024 telah menyita perhatian publik. Badan ini dirancang untuk mengelola aset negara secara efisien di luar APBN dengan tujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kehadiran BPI Danantara

sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengelola investasi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadikannya topik yang penting secara ekonomi, politik, dan sosial (Gayati, 2024).

Awalnya, badan ini direncanakan akan diluncurkan pada 7 November 2024 namun batal diresmikan dikarenakan Presiden Prabowo masih menjalani perjalanan luar negeri. Sehingga peresmiannya dimundurkan hingga dua pekan ke depan menunggu kepulangan Kepala Negara ke tanah air. Akan tetapi setelah Presiden Prabowo kembali ke Indonesia, peresmiannya pun tak kunjung dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum direvisinya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan BPI Danantara, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta turunannya. Akhirnya setelah tiga bulan melewati berbagai perdebatan publik terkait penundaannya, BPI Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 (Abdurrahman, 2025).

Penundaan peresmian BPI Danantara telah menjadi isu yang menarik perhatian berbagai pihak. Sejak awal pemberitaan pada tanggal 6 November 2024, wacana terkait alasan, dampak, serta implikasi dari penundaan tersebut ramai dibahas di berbagai media daring. Presiden Prabowo menyatakan agar tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaannya. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menegaskan bahwa penundaan ini mencerminkan ketidakpastian konsolidasi

BUMN yang seharusnya dapat dilakukan bersama-sama dengan penyusunan regulasi pendukung. Ia menyarankan pemerintah bergerak cepat dan belajar dari negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang memiliki lembaga serupa untuk mengelola investasi negara secara efektif (Al-Yamani, 2024).

Penundaan ini juga memunculkan berbagai spekulasi mengenai latar belakang keputusan tersebut (Sofia, 2024). Ada yang menduga ini berkaitan dengan dinamika politik-domestik, tarik ulur kepentingan antara lembaga pemerintah dan swasta, hambatan teknis-administratif yang belum terpecahkan seperti penegasan kerangka kerja hukum serta pengelolaan sumber daya manusia yang cukup. Keberhasilan peluncuran BPI Danantara akan menjadi katalisator untuk memperkuat upaya penguatan daya saing ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, keterlambatan ini mengundang kekhawatiran bahwa kesempatan strategis justru terlewatkan. Hal itu mempertegas bahwa pentingnya BPI Danantara sebagai institusi strategis tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai pengelola investasi tetapi juga peran simbolis dalam menarik kepercayaan investor baik domestik maupun internasional (Soemekto, 2024).

Penundaan pembukaan resmi BPI Danantara mencirikan bahwa kebijakan besar sering kali tidak lepas dari pengaruh berbagai kepentingan yang saling bersaing. Dalam konteks ini, media daring menjadi ajang utama bagi aktor-aktor untuk menyuarakan pendapat mereka, baik mendukung maupun mengkritisi

keputusan penundaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan diversitas perspektif terbuka antara dukungan terhadap langkah pemerintah untuk memastikan kesiapan operasional dan kritik tajam terhadap lambatnya proses pengambilan keputusan.

Sejumlah penelitian sebelumnya di Indonesia menunjukkan bahwa sejalan dengan isu mengenai pengelolaan investasi negara, sering terjadi perbedaan beragam kepentingan dan perspektif diantara para pemangku kepentingan terkait (Elislah, 2023; Komala, 2024; Pasandaran et al., 2024; Saputra, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan betapa dinamika politis dan kepentingan berbagai aktor mampu memengaruhi wacana kebijakan ekonomi di Indonesia (Aladdin & Hanafi, 2023; Amrihani et al., 2024; Hassapni & Kurniawan, 2020; Kasih, 2023).

Penelitian Shawoo et al. (2023) menemukan adanya perbenturan kepentingan antara aktor negara dan non-negara yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan investasi sehingga pembangunan menuntut upaya-upaya koherensi sebagai syarat agar pembangunan dapat berkelanjutan. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa media memainkan peran penting dalam membingkai isu-isu kebijakan publik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Cara media menyajikan informasi dapat memengaruhi opini publik dan memberikan tekanan kepada pengambil kebijakan. Hal ini menegaskan pentingnya memahami peran media sebagai aktor dalam

arena wacana kebijakan (Aladdin & Hanafi, 2023; Goodwin et al., 2018; Hanych et al., 2023; Khanya, 2024).

Adapun penelitian Blum & Kuhlmann (2019) membuktikan bahwa dalam konteks kebijakan, keberadaan narasi yang dominan sering kali digunakan untuk melegitimasi keputusan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan wacana tidak hanya mencerminkan pandangan aktor, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memengaruhi arah kebijakan. Sementara studi terkait kebijakan pengelolaan investasi negara (SWF) di Indonesia, khususnya BPI Danantara, hanya sebatas mengkaji aspek manajemen dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya (Guo & Velentina, 2025; Johan, 2022). Secara global, metode DNA masih minim diterapkan dalam mengkaji wacana/teks berkaitan dengan SWF. Studi Nowacki et al. (2020) menggunakan metode *structural topic modeling* pada konten laporan dan situs resmi dari 83 SWF di seluruh dunia (tidak termasuk Indonesia).

Artinya, masih minim studi komunikasi yang mengkaji perdebatan kebijakan pengelolaan badan investasi negara tersebut, terutama dalam perspektif teori dan metode jaringan wacana. Padahal dalam ranah praktis, implikasi yang ditimbulkan dari peresmian pembentukan badan ini sangat krusial dalam pengelolaan seluruh aset-aset negara. Namun sayangnya belum ditemukan studi komunikasi yang spesifik menganalisis perdebatan peresmian badan ini sebagai isu publik yang

prioritas, karena masih dipandang hanya sebagai isu kelompok elit semata. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya berkontribusi secara praktis, teoritis, dan metodologis dalam mengidentifikasi interaksi jaringan koalisi wacana yang terbentuk beserta aktor-aktor utama di balik isu penundaan peresmian BPI Danantara.

TINJAUAN PUSTAKA

Discourse Coalition Framework (DCF) atau Kerangka Koalisi Wacana, sering digunakan untuk mengkaji proses pengambilan kebijakan sebagai hasil pertarungan aktor-aktor dalam memengaruhi pengambil keputusan. DCF dikembangkan oleh Maarten Hajer, berfokus pada pentingnya argumentasi dalam pelaksanaan pembentukan kebijakan publik dengan menitikberatkan pada pendayagunaan bahasa dan konstruksi realitas sosial sebagai inti kajian wacana. Setiap aktor berupaya menyampaikan gagasannya meyakinkan khalayak bahwa pandangan mereka adalah yang paling benar. Proses ini terjadi melalui diskusi, di mana para aktor mengambil posisi dan berdebat mengenai isu-isu kontroversial. Dalam membangun wacana, aktor menggambarkan suatu masalah atau isu melalui caranya masing-masing untuk memperoleh dukungan publik (Eriyanto, 2022; Kasih, 2023).

Hajer (1993) mendefinisikan koalisi wacana sebagai sekelompok aktor yang berbagi konstruksi sosial tertentu dalam memaknai situasi sosial yang ambigu. Mereka berupaya mempersuasi, memanipulasi, atau

menggunakan kekuasaan tertentu untuk mempromosikan konstruksi sosial tersebut. Konstruksi sosial ini merupakan sebuah wacana, yaitu kumpulan ide, konsep, dan kategori makna yang diberikan terhadap suatu realitas atau fenomena dalam konteks historis tertentu. Wacana yang berhasil atau menang dimulai dari tahap penyusunan *storyline* melalui penggunaan konsep-konsep baru, kemudian menyatukan berbagai *storyline* tersebut ke dalam suatu koalisi wacana melalui penggunaan media, lalu menguasai ruang diskusi untuk membentuk pandangan publik (*structuration of discourse*), hingga kristalisasi wacana tersebut menjadi terlembagakan (*institutionalized discourse*).

Dalam penguasaan ruang publik melalui komunikasi politik dan gerakan sosial-politik, DCF lebih menitikberatkan pada praktik (re)produksi wacana, sehingga kurang memperhatikan struktur kekuatan aktor di dalamnya. Teori ini berbanding terbalik dengan teori *Advocation Coalition Framework* (ACF) yang lebih memfokuskan analisis pada koalisi advokasi, yaitu sekumpulan aktor yang memiliki keyakinan serupa yang berkontestasi untuk memengaruhi pembuatan kebijakan. Karena lebih fokus pada argumentasi wacana yang terbentuk, maka DCF juga tidak fokus pada (re)produksi wacana melalui media, sebagaimana Teori Agenda-Setting (*Framing*). Berbeda dengan Teori Wacana yang lebih menganalisis makna wacana secara parsial, DCF lebih melihat keterkaitan koalisi wacana secara holistik dalam suatu jaringan

komunikasi Hajer (1993; 1995; 2002) dalam Eriyanto (2022).

Berkaitan dengan kebijakan publik, Hajer (2002) melihat terjadi pergeseran praktik DCF, dari semula *linguistic turn* yang hanya memfokuskan penggunaan diksi dan bahasa, menjadi *argumentative turn* yang melihat posisi lawan dalam memproduksi wacana dan konteks praktik sosial-politik yang ada. Untuk itu digunakan pisau Analisis Wacana Argumentatif (*Argumentative Discourse Analysis* atau ADA), di mana salah satu metodenya adalah DNA. Analisis DCF ini mencakup tiga elemen yang saling terkait, yaitu wacana, praktik, dan makna. Alokasi makna dalam konteks tertentu dapat dianalisis melalui (re)produksi bentuk-bentuk wacana dalam konteks praktik-praktik tertentu. Bukan sekedar melihat argumen atau wacana, tetapi juga menganalisis kondisi sosial-politik sebagai sebuah permainan 'pemosisian' alokasi makna dan wacana tertentu. Bukan individu atau aktor yang menjadi subjek analisis, melainkan praktik-praktik yang dilakukan, melacak cara orang memosisikan satu sama lain melalui penggunaan bahasa, atau cara mereka diposisikan melalui wacana yang digunakan secara luas.

DCF telah banyak diterapkan dalam permasalahan kebijakan publik lembaga pemerintah. Di Jerman misalnya, penelitian Markard et al. (2021) yang mengkaji pertarungan wacana publik terkait kelayakan batubara dalam sistem energi menemukan bahwa adanya perbedaan pandangan antara

dua kelompok aktor yang diberitakan dalam dua surat kabar dengan ideologi berbeda. Penelitian ini membuktikan terjadinya pergeseran wacana, di mana kelompok yang awalnya mendukung penggunaan batu bara secara lebih moderat lalu berubah menjadi menolak, bahkan membentuk koalisi wacana yang berujung pada kesepakatan bersama untuk menghapus penggunaan batu bara di masa depan.

Dalam konteks Indonesia, DCF juga telah banyak diaplikasikan dalam membedah pertarungan wacana kebijakan publik pada instansi-instansi pemerintah. Seperti pada penelitian Pasandaran et al. (2024) yang memetakan koalisi wacana reaksi publik atas 100 artikel pemberitaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudriset) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada lima media daring, yaitu: tempo.co, detik.com, cnnindonesia.com, kompas.com, dan idntimes.com. Teori DCF diaplikasikan dengan pendekatan DNA berhasil mengidentifikasi koalisi-koalisi wacana pro dan kontra yang terbentuk merespon Permendikbudriset tersebut.

Koalisi wacana yang menentang muncul dari partai politik dan organisasi masyarakat sipil berbasiskan keagamaan, terutama menyoroti wacana aspek-aspek kesepakatan (*consent*) dalam kekerasan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Sementara koalisi wacana yang mendukung

berangkat dari organisasi hak asasi manusia, universitas, dan lembaga pemerintah. Koalisi ini menyoroti beberapa wacana positif, seperti: (1) kejelasan definisi kekerasan seksual, khususnya spektrum perilaku kekerasan seksual yang lebih luas, seperti menatap secara seksual dan melakukan ejekan seksual (*catcalling*); (2) dasar hukum pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di universitas; dan (3) potensi efek jera bagi pelaku.

Penelitian Hassapni dan Kurniawan (2020) terhadap kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* berhasil menggambarkan kompleksitas jaringan wacana dibaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan DNA untuk menganalisis wacana yang berkembang terkait kebijakan tersebut. Kebijakan penenggelaman kapal yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan nelayan dan stok ikan. Studi tersebut bertujuan guna mengeksplorasi data dari media daring untuk memetakan pola jejaring wacana yang mencakup aktor-aktor terkait, hubungan antara aktor, serta keterkaitan antara konsep yang muncul dalam wacana publik mengenai kebijakan penenggelaman kapal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kompleksitas hubungan dalam wacana tersebut yang divisualisasikan dalam bentuk jaringan.

Berkenaan dengan isu penundaan pemilu, studi Elislah (2023) menganalisis perdebatan hangat seputar isu tersebut

selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama pada periode Januari hingga April 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan DNA untuk memetakan pertarungan wacana yang berkembang, aktor-aktor dominan yang terlibat, serta hubungan antara wacana dan kebijakan publik. Pernyataan-pernyataan aktor dikumpulkan dari Kompas.com dan Detik.com, kemudian dianalisis dan divisualisasikan struktur-struktur wacananya. Penelitian ini menemukan bahwa isu penundaan pemilu dapat menciptakan wacana konflik, yang sering muncul pada kebijakan kontroversial. Konflik wacana tersebut memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap politisi, sehingga berbanding lurus dengan meningkatnya sinisme politik. Fenomena ini menyebabkan kesulitan bagi para pemimpin politik dalam mengambil keputusan, karena tingginya tekanan untuk menghindari isu-isu kontroversial (Elislah, 2023).

Adapun penelitian yang mengkaji proses formulasi UU PDP di Indonesia dapat dikaitkan dengan Teori *Discourse Coalition Framework* (DCF). Dalam studinya, Komala (2024) menilik dinamika interaksi antara DPR dan Pemerintah selama pembahasan UU PDP, termasuk perdebatan mengenai independensi lembaga pengawas data pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan sangat dipengaruhi oleh narasi yang dibangun oleh para aktor yang terlibat. DCF memiliki relevansi untuk memahami bagaimana wacana-wacana yang bersaing

memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan.

Dalam konteks UU PDP, Komala memperlihatkan bagaimana wacana independensi lembaga pengawas (didukung oleh DPR) bersaing dengan wacana efisiensi birokrasi (didukung oleh Pemerintah). Kedua narasi ini membentuk dua koalisi wacana yang berbeda, masing-masing mencoba untuk mendominasi pembahasan kebijakan. Penelitian tersebut menerangkan bahwa koalisi wacana yang mendukung efisiensi birokrasi berhasil mendominasi dengan memanfaatkan narasi pragmatis tentang keselarasan struktur pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tahap “strukturasi wacana” dalam DCF, di mana narasi yang dominan mulai mendapatkan dukungan luas meskipun belum mencapai tahap institusionalisasi penuh (Komala, 2024).

Penelitian terbaru oleh Amrihani et al. (2024) menggunakan pendekatan DNA untuk memetakan wacana kebijakan impor beras di Indonesia. Analisis data dari media daring Kompas.id mengungkap berbagai argumen dari aktor pro dan kontra yang digunakan untuk memengaruhi opini publik. Temuan menunjukkan bahwa wacana tersebut erat kaitannya dengan isu stabilisasi cadangan beras, kerja sama internasional, penurunan harga, antisipasi perubahan iklim, pelanggaran undang-undang pangan, dan kewaspadaan terhadap stok beras.

Dengan teori *Discourse Coalition Framework* (DCF), penelitian tersebut

menjelaskan bagaimana aktor dengan sumber daya terbatas dapat memenangkan pertarungan kebijakan melalui narasi yang persuasif, di mana koalisi wacana terbentuk antara aktor-aktor dengan pandangan serupa yang bekerja sama menggunakan narasi konsisten dan strategi komunikasi terarah. Pendekatan DNA ini berhasil menggambarkan dinamika kebijakan publik pada isu kompleks seperti impor beras di Indonesia sekaligus menunjukkan bagaimana narasi tertentu dapat mendominasi opini publik dan memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan.

Sampai kini, masih minim penelitian yang spesifik mengkaji perkembangan jaringan koalisi wacana terkait penundaan peresmian BPI Danantara secara khusus, maupun SWF secara umum. Riset linguistik komparatif baru dilakukan oleh Nowacki et al. (2020) dengan menggunakan metode *structural topic modeling* pada konten laporan dan situs resmi dari 87 SWF di seluruh dunia, namun sayangnya belum mengikutsertakan lembaga SWF di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa topik-topik yang muncul cenderung negatif, lebih banyak menggambarkan bentuk baru legitimasi kapitalisme negara ketimbang portofolio strategi pengelolaan investasinya. Sehingga kesenjangan penelitian terkait wacana penundaan BPI Danantara memberikan ruang untuk menelaah lebih dalam dinamika hubungan antara aktor-aktor utama dalam wacana ini. Kebaruan penelitian terletak pada upaya untuk memetakan secara komprehensif wacana-wacana yang

berkembang terkait penundaan peresmian BPI Danantara dengan menggunakan metode DNA, yang cenderung digunakan untuk meneliti kajian tentang kebijakan pemerintah (Kasih, 2023).

Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi posisi masing-masing aktor, melainkan juga menggali pola interaksi di antara mereka, seperti cara aktor tertentu membentuk koalisi berdasarkan kesamaan pandangan atau ideologi ataupun karena kepentingan strategis. Sumber data DNA juga memberi kesempatan untuk melihat dinamika wacana dari perspektif jaringan, di mana setiap aktor tidak sendiri, melainkan saling terhubung dalam proses produksi dan reproduksi wacana.

Penundaan peresmian BPI Danantara tidak hanya memantik wacana di berbagai media daring, tetapi turut mencerminkan kompleksitas dinamika kebijakan publik di Indonesia. Dalam arena wacana ini, berbagai aktor mulai dari pemerintah, pakar ekonomi, politisi, hingga masyarakat umum, menyuarakan pandangan dan kepentingan masing-masing. Perbedaan sudut pandang ini melahirkan beragam wacana yang tidak hanya membingkai isu penundaan tetapi juga memperlihatkan bagaimana opini publik dipengaruhi oleh narasi-narasi yang berkembang (Saputra, 2024; Supran & Oreskes, 2021). Peran media daring dalam menyebarluaskan wacana-wacana ini menjadi sangat penting, mengingat media bukan hanya sekadar saluran informasi, tetapi juga menjadi arena di mana narasi bersaing untuk

mendapatkan legitimasi.

Dalam penelitian ini, teori *Discourse Coalition Framework* (DCF) digunakan untuk menganalisis bagaimana wacana mengenai penundaan peresmian BPI Danantara dibentuk, didukung, dan dikritik oleh berbagai pihak. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi terhadap bagaimana narasi dominan dalam wacana ini dipertahankan atau ditantang oleh aktor-aktor yang berbeda. Memahami dinamika jaringan wacana menjadi krusial untuk mengidentifikasi pola hubungan di antara aktor-aktor yang terlibat, termasuk bagaimana mereka berinteraksi, membangun koalisi, atau bahkan berkonflik dalam menyampaikan pandangan mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan memadukan pendekatan kualitatif-kuantitatif (*sequential exploratory design*). Secara ontologi, peneliti meyakini bahwa keseluruhan observasi terhadap pertarungan wacana ini tak pernah luput dari kekeliruan karena hanya dapat diketahui secara probabilistik, sehingga semua teori dapat direvisi kembali (realisme kritis). Karena secara epistemologi, jarak hubungan antara peneliti dengan objek penelitian tidak dapat dipisahkan, sehingga berpotensi bias peneliti berdasarkan teori yang dibawa, pengalaman budaya, dan pandangan subjektifnya. Karena adanya potensi kekeliruan dan bias tersebut, maka secara metodologi penelitian ini melibatkan beberapa pengukuran dalam memahami realitas pertarungan wacana ini,

baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Creswell & Creswell, 2023).

Untuk itu, penelitian ini memilih menggunakan metode Analisis Jaringan Wacana (*Discourse Network Analysis* atau DNA) yang erat kaitannya dengan proses pembentukan kebijakan publik. Metode ini dipilih untuk memaparkan dan menelaah bagaimana aktor memakai wacana serta sumber daya yang mereka miliki guna memengaruhi opini publik. Pendekatan ini mampu memvisualisasikan struktur debat kebijakan, mengidentifikasi eksistensi koalisi, serta memahami dinamika perdebatan kebijakan dari masa ke masa (Leifeld, 2020). Metode ini dipilih sebab lebih komprehensif karena menggabungkan metode Analisis Wacana yang hanya fokus menganalisis wacana, dan metode Analisis Jaringan Sosial yang lebih menitikberatkan aktor dan relasi antara aktor. Sementara DNA fokus pada keterkaitan kedua objek analisis metode sebelumnya, yakni: (1) wacana dan konteks sosialnya (*discourse*); (2) aktor-aktor yang memproduksi/reproduksi wacana tersebut (*nodes*) beserta relasi antara aktornya (*links/ties*); dan (3) hubungan antara aktor dan wacana tersebut (Eriyanto, 2022).

Terdapat dua elemen penting dalam metode DNA yang terkait dengan penelitian komunikasi ini, yaitu: (1) wacana atau pesan yang meliputi bermacam gagasan, buah pikiran, hingga pernyataan argumentasi; dan (2) aktor atau komunikator yang terhubung dengan tokoh yang mengemukakan gagasan,

buah pikiran, atau *statement* tersebut (Leifeld, 2020; Putri et al., 2023). Metode DNA umumnya dipakai untuk memetakan wacana perdebatan publik yang mendorong terjadinya pertarungan koalisi-koalisi wacana. Aktor, baik individu hingga organisasi tidak hanya mengutarakan gagasan, tetapi turut berupaya agar argumentasi mereka menjadi dominan atau memenangkan pertarungan. Dominasi tersebut diwujudkan melalui pengaruh wacana yang berkembang di masyarakat maupun media yang pada akhirnya difasilitasi dalam kebijakan publik.

Koalisi wacana mengacu pada sekumpulan aktor yang memakai wacana, metafora, atau narasi tertentu guna membahas suatu isu dalam rentang waktu khusus. Aktor-aktor ini dapat berasal dari beragam kelompok seperti akademisi, politisi, pemerintah, mahasiswa, publik, lembaga, dan lain-lain. Koalisi wacana bisa dikenali melalui keseragaman perspektif, wacana, serta narasi dari aktor-aktor tersebut. Proses ini disebut sebagai koalisi sebab melibatkan proses berbagi sudut pandang dan nilai sehingga dalam proses pembentukan kebijakan, koalisi wacana hadir sebagai gambaran berbagai sudut pandang yang berbeda atas suatu isu atau masalah tertentu (Eriyanto, 2022).

Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui beberapa tahapan. Pertama peneliti mengumpulkan data kualitatif. Peneliti menganalisis 35 artikel berita yang dikumpulkan dalam rentang waktu 6–20 November 2024. Peneliti melakukan pencarian

35 artikel berita pada *web browser* dengan menggunakan frasa kata kunci yang saling berhubungan dan dimasukkan secara bergantian untuk memperoleh hasil yang relevan, yaitu: “Danantara batal diresmikan”, “Peluncuran Danantara diundur”, “Pemerintah tunda peresmian Danantara”, dan “Prabowo tunda pembentukan Danantara”. Total 35 artikel berita tersebut bersumber dari 22 media daring yang meliputi: Bisnis.com, CNBCIndonesia.com, CNNIndonesia.com, Detik.com, Finance.detik.com, IDNTimes.com, Inilah.com, Investor.id, Ipol.id, JPNN.com, Kompas.com, Kontan.co.id, Kumparan.com, Liputan6.com, MediaIndonesia.com, MetroTVNews.com, TVOneNews.com, Okezone.com, PolitikIndonesia.id, Rmol.id, Republika.co.id, dan Tribunnews.com.

Artikel-artikel berita tersebut dipilih berdasarkan kriteria inklusif sebagai berikut: (1) kesesuaian antara topik dengan isi berita; (2) isi berita bukan bagian dari halaman advertorial, tetapi berupa siaran pers dan hasil liputan media yang membahas penundaan peresmian BPI Danantara dari berbagai pihak, mulai dari perwakilan pemerintah, BPI Danantara, Kementerian BUMN, akademisi, pakar ekonomi, dan pengamat lainnya; dan (3) berita memuat pernyataan atau kutipan langsung dari aktor-aktor yang tercantum dalam berita. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk menyuarakan gagasan kepada masyarakat luas agar mendapatkan kepercayaan dari publik (Eriyanto, 2022).

Kedua, setelah data kualitatif berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan analisis data kuantitatif. Peneliti mengkodekan berita-berita tersebut berdasarkan klasifikasi *person*, *organization*, *category*, dan *argument* menggunakan tools DNA Analyzer 2.0. *Person* merujuk pada nama aktor, sementara *organization* menunjukkan organisasi mana yang menjadi tempat aktor tersebut berada. Kategori menandakan wacana atau konsep yang digagas aktor dalam artikel pemberitaan di *web media* daring, sementara *agreement* mengindikasikan apakah suatu konsep mendukung atau menolak masalah yang dibahas. Tahap ketiga adalah visualisasi data yang meliputi jaringan aktor, jaringan konsep, hingga jaringan afiliasi. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Visone-2.24 guna menaksir sejauh mana aktor dan konsep saling terkoneksi, baik dengan aktor lain ataupun konsep lainnya.

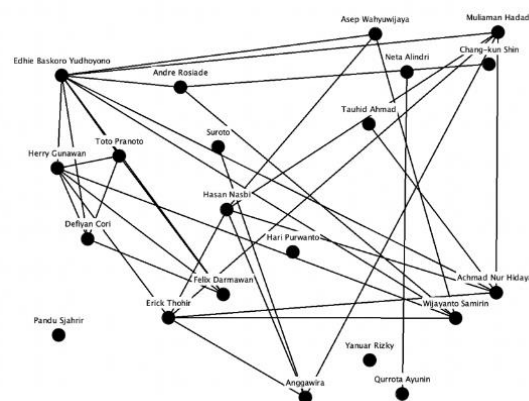
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menemukan tiga jaringan wacana dalam pertarungan koalisi wacana penundaan peresmian BPI Danantara, yaitu jaringan aktor, jaringan konsep, dan jaringan afiliasi.

Jaringan Aktor

Melalui tampilan hasil pengolahan aplikasi Visone, terdapat 21 aktor yang ikut serta dalam perdebatan mengenai pro dan kontra atas peristiwa penundaan peresmian Danantara. Aktor yang memiliki konsep serupa akan membentuk jaringan, sedangkan aktor tanpa kesamaan konsep tidak akan terhubung jaringan seperti yang terlihat pada Gambar 1

berikut.



Gambar 1. Jaringan Aktor dalam Wacana Penundaan Peresmian Danantara

Sumber: Hasil Pengolahan Data Visone (2024)

Sentralitas tingkatan (*degree centrality*) menunjukkan popularitas aktor dalam jaringan. Popularitas tersebut diukur dari jumlah hubungan (*link/edge*) aktor dengan aktor lainnya. *Degree centrality* mempunyai peran penting sebab dapat membuktikan sejauh mana seorang aktor atau sebuah konsep tertentu mengungguli suatu isu. Sementara itu, sentralitas kedekatan (*closeness centrality*) mengukur sejauh mana kedekatan aktor dengan aktor lainnya dalam jaringan. Kedekatan ini mencerminkan seberapa mudah atau sulit sebuah aktor dapat dijangkau oleh aktor lain dalam jaringan. Aktor dengan *closeness centrality* rendah menunjukkan bahwa aktor tersebut memiliki kedekatan dengan aktor lain (Eriyanto, 2014; Putri et al., 2023).

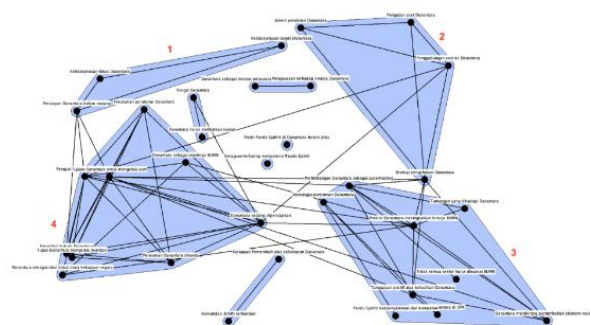
Sentralitas perantara (*betweenness centrality*) mengukur peran aktor sebagai penghubung dalam sebuah jaringan. Aktor dengan nilai *betweenness centrality* tertinggi adalah aktor yang berfungsi efektif sebagai penghubung antar-aktor lainnya. Posisi ini

sangat penting sebab memungkinkan aktor tersebut menjembatani hubungan antara aktor-aktor lain dalam jaringan. Tanpa keberadaan penghubung, beberapa aktor pada jaringan tidak akan saling terkoneksi. Dalam konteks wacana, posisi mendukung dan menentang sering kali berada pada spektrum yang sangat berbeda dan sulit dipertemukan. Namun, aktor yang berada di tengah-tengah spektrum ini mampu berperan sebagai jembatan antara kedua pihak. Dengan demikian, aktor dengan *betweenness centrality* memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keterhubungan jaringan (Kasih, 2023). Hubungan antara aktor juga dapat dianalisis berdasarkan hasil pengukuran sentralitas seperti yang tampak dijelaskan pada Tabel 1.

Aktor Muliaman Hadad dari lembaga BPI Danantara memiliki frekuensi tertinggi sebesar 35 kali menjadi aktor yang paling banyak membentuk wacana atas dukungan terhadap penundaan peresmian Danantara dalam *web media* daring. Selain itu, Muliaman Hadad juga berperan sebagai perantara paling baik dengan nilai *betweenness centrality* sebesar 7,45%. Sementara itu, Edhie Baskoro Yudhoyono dari organisasi Parpol (Demokrat) menjadi aktor terpopuler serta mendominasi jaringan aktor dengan angka *degree centrality* sebesar 9%. Dalam hal kedekatan, pakar ekonomi Chang-kun Shin memiliki angka *closeness centrality* terkecil sebesar 4,08%, sehingga menunjukkan bahwa dirinya memiliki kedekatan hubungan dengan aktor lainnya.

Jaringan Konsep

Jaringan konsep adalah bentuk visualisasi yang menyajikan hubungan di antara konsep (wacana) di dalam pemberitaan mengenai penundaan peresmian Danantara melalui aplikasi Visone. Gambar 2 di bawah menunjukkan bahwa terdapat empat kluster besar yang saling terhubung dengan tiga kluster kecil dan dua *node* terisolasi yang berdiri sendiri. Beragam wacana tersebut diklasifikasikan menjadi dua kubu, yaitu wacana yang setuju (pro) dan wacana yang tidak setuju (kontra) atas penundaan peresmian Danantara. Keduanya memiliki wacana yang masih saling terhubung sehingga ditemukan garis penghubung antar kluster tersebut.



Gambar 2. Jaringan Konsep dalam Wacana Penundaan Peresmian Danantara

Sumber: Hasil Pengolahan Data Visone (2024)

Konsep “Danantara sedang dipersiapkan” terlihat menjadi pusat utama dalam jaringan. Hal ini mencerminkan bahwa proses persiapan Danantara merupakan isu sentral yang menjadi alasan mengapa peresmian Danantara ditunda dan berperan sebagai penghubung terhadap konsep-konsep lainnya. Peneliti turut mengamati bahwa pada jaringan konsep tersebut, terdapat berbagai penghubung wacana dari kluster 3 ke kluster 4, di antaranya

adalah “Pertimbangan Danantara sebagai *superholding*”, “Potensi Danantara meningkatkan kinerja BUMN”, dan “Danantara mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”.

Sementara itu, konsep “Persiapan Danantara belum matang” menjadi penghubung antara kluster 1 dan kluster 4. Konsep tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa Danantara belum kunjung diresmikan. Sementara itu, kluster kecil yang terdiri dari konsep “Keraguan Pemerintah atas peluncuran Danantara” dan “Konsolidasi BUMN terhambat” merupakan wacana yang kontra terhadap penundaan peresmian Danantara. “Posisi Pandu Sjahrir di Danantara belum jelas” dan “Keraguan terhadap kompetensi Pandu Sjahrir” adalah *node* terisolasi yang tidak memiliki koneksi langsung dengan konsep lain. *Node-node* tersebut mencerminkan pandangan atau isu tertentu yang muncul dalam diskusi utama. Meskipun konsep tersebut belum banyak dibahas, isu ini tetap relevan bagi beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap Danantara.

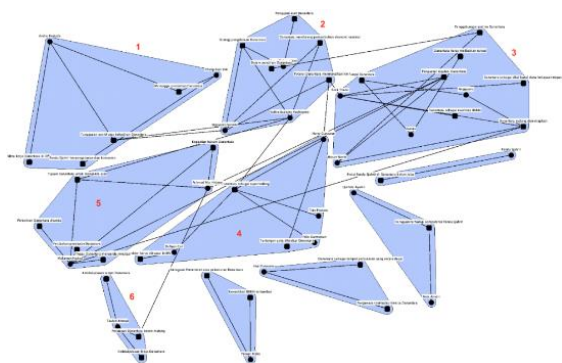
Di tengah pemberitaan yang ramai mengenai penundaan peresmian Danantara, beberapa berita tentang Pandu Sjahrir juga muncul. Saat itu, Pandu Sjahrir dikabarkan akan menjadi COO BPI Danantara sehingga isu ini tetap menjadi bahan pembicaraan walaupun pemberitaannya tidak sebanyak konsep yang lain. Hasil pengukuran sentralitas jaringan konsep dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Konsep yang paling populer dan dominan dalam wacana penundaan peresmian

Danantara adalah “Danantara sedang dipersiapkan” dan “Tujuan Danantara untuk mengelola aset”, keduanya memiliki nilai *degree centrality* sebesar 11%. “Danantara sedang dipersiapkan” turut menjadi konsep dengan frekuensi tertinggi sebanyak 14 kali. Sementara itu, “Perubahan Peraturan Danantara”, “Peresmian Danantara Ditunda”, dan “Pertimbangan Danantara sebagai *Superholding*” merupakan konsep-konsep dengan nilai *closeness centrality* terkecil, yaitu sebesar 3,85% dan 4,30%. Maka, ketiga wacana tersebut mempunyai kedekatan hubungan paling baik terhadap konsep lainnya. Ternyata, konsep yang memiliki nilai *betweenness centrality* tertinggi sebesar 6,66% juga merujuk pada Konsep “Pertimbangan Danantara sebagai *Superholding*”, menjadikannya konsep yang paling banyak terhubung dengan konsep lain, terutama pada konsep mendukung penundaan peresmian Danantara.

Jaringan Afiliasi

Jaringan afiliasi adalah visualisasi yang menggambarkan hubungan antara aktor dan konsep (wacana atau argumentasi). Visualisasi ini memperlihatkan enam kluster yang saling terhubung dan empat kluster yang berdiri sendiri, seperti tampak pada Gambar 3. Kluster tersebut menggambarkan bahwa aktor atau wacana di dalam kluster yang sama mempunyai tingkat keterhubungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di luar kluster tersebut.



Gambar 3. Jaringan Afiliasi dalam Wacana Penundaan Peresmian Danantara

Sumber: Hasil Pengolahan Data Visone (2024)

Aktor Andre Rosiade (DPR) dan Chang-kun Shin (Pengamat) dengan wacana “Tanggapan positif atas kehadiran Danantara” menjadi penghubung kluster 1 dan kluster 2. Edhie Baskoro Yudhoyono (Parpol) merupakan aktor penghubung antara kluster 2 dengan kluster 4 dan 5. Di samping itu, Erick Thohir (Pemerintah) dengan wacana “Penguatan regulasi Danantara” menjadi penghubung antara kluster 3 dengan kluster 4 dan 5. Muliaman Hadad (Danantara) dan Achmad Nur Hidayat (Pengamat) dengan wacana “Kepastian hukum Danantara” merupakan jembatan dari kluster 5 ke kluster 6. Aktor dan wacana yang saling terhubung tersebut dapat membentuk jaringan afiliasi yang saling terkait.

Jaringan afiliasi ini dapat dikelompokkan menjadi enam kluster besar menggunakan metode *Girvan-Newman Clustering* (GNC). Empat kluster yang tidak terhubung dengan enam kluster lainnya menunjukkan aktor dan wacana yang kontra terhadap penundaan peresmian Danantara, yaitu Yanuar Rizky (Pengamat) yang menyatakan bahwa penundaan peresmian Danantara disebabkan oleh keraguan Pemerintah sehingga membuat

konsolidasi BUMN dapat terhambat. Hari Purwanto (Pengamat) turut menyuarakan ketidaksetujuannya sebab khawatir BPI Danantara nantinya hanya akan menjadi tempat perputaran uang secara ilegal.

Aktor Pandu Sjahrir (Pengusaha) disebut dalam konsep pada kluster yang terpisah sebab namanya sempat muncul di tengah maraknya pemberitaan tentang penundaan peresmian Danantara. Pandu digadang-gadang akan direkrut menjadi COO BPI Danantara. Atas munculnya pemberitaan tersebut, Qurrota Ayunin (Publik) dan Neta Alindri (Publik) menghadirkan wacana yang menyatakan keraguannya terhadap kompetensi terhadap Pandu Sjahrir. Keraguan tersebut disebabkan karena Pandu Sjahrir merupakan keponakan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang dikenal sebagai ‘Menteri Segala Urusan’ karena banyak memikul banyak peran di kementerian. Atas beberapa pemberitaan tersebut, Pandu Sjahrir (Pengusaha) pun turut buka suara dengan menyebutkan bahwa ia belum memiliki posisi yang jelas di dalam BPI Danantara. Hasil pengukuran sentralitas jaringan afiliasi dapat dijelaskan melalui Tabel 3.

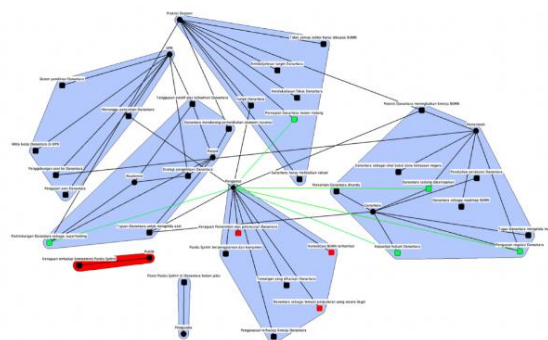
Aktor Muliaman Hadad selaku Ketua BPI Danantara mempunyai frekuensi pemberitaan tertinggi sebanyak 35 kali dalam jangka waktu 6 - 20 November 2024 serta memiliki nilai *betweenness centrality* tertinggi sebesar 6,63% sehingga ia merupakan aktor yang berperan paling baik sebagai aktor penghubung dengan aktor lain. Muliaman juga turut memiliki nilai

degree centrality sebesar 7%, menjadikannya aktor terpopuler dan dominan dalam wacana penundaan peresmian Danantara.

Tidak hanya itu, Muliaman Hadad (Danantara) dan Erick Thohir (Pemerintah) adalah aktor dengan nilai *closeness centrality* paling rendah, yaitu sebesar 2,89%. Artinya, kedua aktor tersebut merupakan aktor yang paling dekat dengan wacana dominan. Sementara itu, konsep yang paling banyak disebutkan adalah “Danantara sedang dipersiapkan” dengan frekuensi sebanyak 14 kali. Konsep tersebut merupakan konsep yang pro atau mendukung kebijakan penundaan peresmian Danantara. Sementara itu, konsep yang memiliki *closeness centrality* terkecil adalah “Perubahan Peraturan Danantara” dengan nilai sebesar 2,24%.

Tahapan dalam afiliasi wacana terdiri dari tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir (Kasih, 2023). Wacana terkait penundaan peresmian Danantara masih berada pada tahap awal sehingga koalisi wacana belum terbentuk. Saat ini, setiap aktor masih memegang teguh wacananya masing-masing. Hal tersebut dapat ditinjau dari keberadaan aktor-aktor yang belum membentuk jaringan serta jaringan konsep yang terbagi menjadi enam klaster besar yang saling terhubung. Koalisi wacana baru akan teridentifikasi jika studi dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih panjang seperti beberapa bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Penelitian sebelumnya tentang sengketa batu bara *fase-out* di Jerman menggunakan metode DNA

selama 20 tahun sejak tahun 2000-2020 guna mengidentifikasi koalisi wacana yang tercipta (Markard et al., 2021).



Gambar 4. Jaringan Afiliasi antara Organisasi – Konsep dalam Wacana Penundaan Peresmian Danantara
Sumber: Hasil Pengolahan Data Visone (2024)

Peneliti juga menemukan bahwa terdapat jaringan afiliasi yang dibentuk oleh organisasi serta konsep yang tertera dalam pemberitaan di *webmedia* daring. Jaringan tersebut terbagi ke dalam lima klaster besar dan dua klaster kecil, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Kelima klaster besar ini menggambarkan hubungan antara aktor dan wacana yang mereka bawa. Satu aktor dapat mengangkat lebih dari satu wacana, sementara satu wacana dapat didukung oleh beberapa aktor sehingga terbentuk jaringan yang kompleks. Berdasarkan hasil visualisasi jaringan afiliasi organisasi dan konsep, peneliti menghadirkan visualisasi yang sistematis untuk memperlihatkan pola jaringan yang tercipta. Organisasi dalam visualisasi ini dipilih sebagai representasi kelompok aktor yang relevan seperti Danantara, Akademisi, DPR, Pemerintah, Partai Politik, Praktisi Ekonomi, Pengamat, Publik, dan sebagainya. Garis dengan warna berbeda yang menghubungkan organisasi yang sama menandakan adanya

wacana yang beragam dalam satu organisasi, baik yang mendukung (pro) maupun yang menolak (kontra).

Sementara itu, wacana yang kontra yang diusung oleh Publik dan Pengamat masih kurang dominan, terlihat dari kluster dan kotak konsep berwarna merah. Ketidaksetujuan yang tergambar dalam visualisasi tidak hanya tentang penundaan peresmian Danantara, melainkan juga terhadap isu dalam pemberitaan yang menyatakan bahwa Pandu Sjahrir, seorang pengusaha sekaligus keluarga dari Luhut Binsar Pandjaitan hendak ditunjuk sebagai COO BPI Danantara di tengah banyaknya pemberitaan tentang penundaan tersebut. Oleh sebab itu, setelahnya terdapat beberapa pemberitaan mengenai respons publik atas isu tersebut. Hasilnya adalah publik kontra dengan isu yang menyangkut Pandu Sjahrir karena menurut mereka seharusnya posisi strategis untuk sebuah lembaga baru yang akan mengelola aset negara patut diisi oleh individu yang berkompeten.

Maka, isu tentang Pandu Sjahrir yang muncul di tengah-tengah pemberitaan penundaan peresmian Danantara menjadi temuan dalam penelitian ini. Hingga saat ini, peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai *superholding* BUMN masih ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mempersiapkan regulasi dan payung hukum yang matang, termasuk revisi Undang-Undang BUMN agar BPI Danantara dapat beroperasi dengan landasan hukum yang kuat.

Presiden RI, Prabowo Subianto turut mengatakan bahwa proses pembentukan BPI Danantara harus ditempuh melalui prinsip kehati-hatian agar hasil pembentukan tersebut akan berakhir baik pula sesuai yang diharapkan.

Teori DCF yang dikembangkan oleh Maarten Hajer menekankan peran argumentasi dalam pembentukan kebijakan publik, khususnya melalui penggunaan bahasa dan konstruksi realitas sosial. Dalam konteks penelitian mengenai penundaan peresmian BPI Danantara, hasil diskusi menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan teori ini. Diskusi yang diuraikan dalam penelitian memaparkan bagaimana aktor-aktor seperti pemerintah, pengamat ekonomi, dan masyarakat menggunakan narasi tertentu untuk memengaruhi opini publik dan membentuk dukungan terhadap posisi mereka.

Proses diskusi ini mencerminkan dinamika yang dijelaskan oleh DCF, di mana setiap aktor memanfaatkan bahasa dan simbol untuk menggambarkan isu secara strategis dengan tujuan mendapatkan legitimasi publik. Misalnya, aktor yang pro penundaan seperti Muliaman Hadad (Danantara) dan Erick Thohir (Pemerintah) membingkai isu ini sebagai langkah kehati-hatian dalam memastikan kesiapan peraturan dan regulasi Danantara. Sebaliknya, aktor yang kontra seperti Yanuar Rizky (Pengamat) berusaha menggambarkan penundaan sebagai indikasi ketidakpastian atau kurangnya efisiensi pemerintah sehingga menyebabkan konsolidasi BUMN terhambat.

Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana narasi dominan terbentuk melalui diskusi yang intensif. Narasi tentang “Danantara sedang dipersiapkan” dan “Perubahan peraturan Danantara” menjadi sentral dalam wacana dan menunjukkan pengaruh aktor seperti Muliaman Hadad dan Erick Thohir yang memiliki sentralitas tinggi dalam jaringan aktor. Dalam DCF, dominasi narasi semacam ini sering kali menunjukkan keberhasilan sebuah koalisi wacana dalam membangun dukungan terhadap kebijakan tertentu. Maka, pertarungan wacana dalam isu ini dimenangkan oleh wacana yang pro atau setuju terhadap penundaan peresmian Danantara. Selaras dengan pola hubungan antara aktor dan wacana yang memperlihatkan adanya pola koalisi yang setuju terhadap isu ini dan dominan menguasai wacana publik.

Sesuai dengan teori DCF, kendati adanya aktor yang begitu dominan (Muliaman Hadad) menguasai jaringan aktor, namun yang menjadi pemenang koalisi wacana adalah wacana yang mampu beririsan dan saling terhubung satu sama lain, baik pro dan kontra, sehingga mampu mendominasi emosi publik. Hal ini tampak dari penggunaan narasi “*superholding*” sebagai manifestasi dari Danantara, ternyata mampu menjembatani berbagai wacana pro dan kontra terkait isu ini, sehingga diterima positif oleh publik (koalisi aktor). Temuan ini menegaskan bahwa pembentukan suatu kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan pertarungan wacana, di mana bukan hanya tergantung

pada perdebatan dan perebutan sumber daya para aktor, tetapi koalisi pembentuk narasi bersama untuk memengaruhi hasil kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip utama DCF yang melihat kebijakan publik sebagai produk dari konstruksi sosial melalui pertarungan diskursif antaraktor.

Kekuatan wacana ini sejalan dengan temuan riset Markard et al. (2021) dan Pasandaran et al. (2024), yakni wacana pemenang adalah wacana atau narasi yang mampu membingkai, menggerakkan, dan menyatukan wacana-wacana yang berbeda pandangan untuk bergeser menjalin kesepakatan bersama dalam bentuk koalisi wacana bersama. Pembingkai pemberitaan Danantara juga berhasil luput dari isu-isu kebijakan yang kontroversial sehingga tidak menimbulkan kompleksitas hubungan antara aktor, wacana konflik dan sinisme politik, sebagaimana temuan riset Elislah (2023) dan Hassapni dan Kurniawan (2020).

Menguatkan temuan riset Komala (2024) dan Amrihani et al. (2024) sebelumnya, pada tahapan strukturasi wacana ini, pemakaian narasi “*superholding*” cenderung bertujuan pragmatis dan persuasif demi meraih dukungan luas dari publik. Konsistensi penggunaan istilah “*superholding*” diyakini dapat menguatkan citra BPI Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi terbesar di Indonesia yang masuk dalam jajaran Badan Pengelola Investasi Negara (*Sovereign Wealth Fund*) terbesar di dunia (Global SWF, 2025; Sovereign Wealth Fund Institute, 2024).

Artinya, wacana *“superholding”* ini terkoneksi dengan wacana-wacana lain untuk menguatkan argumentasi penundaan peresmian BPI Danantara, yakni Danantara perlu dipersiapkan dengan matang, terutama dari segi perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Temuan wacana positif *“super holding”* ini kontras dengan temuan studi linguistik komparatif Nowacki et al. (2020) sebelumnya terkait analisis konten laporan dan situs resmi dari 87 SWF di seluruh dunia yang justru menemukan narasi/wacana negatif berupa *“legitimasi kapitalisme negara”*.

Temuan menarik lainnya adalah munculnya sosok nama yang berpotensi mengisi jajaran struktural BPI Danantara, yakni Pandu Sjahrir. Kendati hanya berada dalam klaster kecil dan tidak terkoneksi dengan jaringan aktor lain, bahkan memiliki sentimen negatif terkait keraguan publik terhadap kemampuan aktor tersebut, namun melihat konsistensi aktor dalam berwacana untuk mendukung penundaan peresmian BPI Danantara telah menunjukkan bahwa besarnya upaya aktor untuk bisa masuk dalam jaringan aktor-aktor lain dalam pertarungan wacana ini. Latar belakang aktor sebagai pengusaha serta memiliki hubungan keluarga dengan struktur pemerintah dan politik yang ada, diyakini

dapat menjadi modal kuat aktor ini untuk masuk dalam pengelolaan BPI Danantara, kendati tidak diprediksi sebelumnya. Untuk itu perlu mendalami analisis kekuatan aktor tersebut menggunakan pisau teori ACF, melengkapi kerangka teori DCF dalam penelitian ini, sebagaimana temuan riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan aktor utama (Kasih, 2023; Saputra, 2024; Supran & Oreskes, 2021). jaringan aktor lain, bahkan memiliki sentimen negatif terkait keraguan publik terhadap kemampuan aktor tersebut, namun melihat konsistensi aktor dalam berwacana untuk mendukung penundaan peresmian BPI Danantara telah menunjukkan bahwa besarnya upaya aktor untuk bisa masuk dalam jaringan aktor-aktor lain dalam pertarungan wacana ini. Latar belakang aktor sebagai pengusaha serta memiliki hubungan keluarga dengan struktur pemerintah dan politik yang ada, diyakini dapat menjadi modal kuat aktor ini untuk masuk dalam pengelolaan BPI Danantara, kendati tidak diprediksi sebelumnya. Untuk itu perlu mendalami analisis kekuatan aktor tersebut menggunakan pisau teori ACF, melengkapi kerangka teori DCF dalam penelitian ini, sebagaimana temuan riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan aktor utama (Kasih, 2023; Saputra, 2024; Supran & Oreskes, 2021).

Aktor	Frekuensi	Degree (%)	Indegree (%)	Outdegree (%)	Closeness (%)	Betweenness (%)
Muliaman Hadad	35	5	7,35	7,35	7,22	7,45
Erick Thohir	8	6	8,82	8,82	7,51	1,18
Chang-kun Shin	8	1	1,47	1,47	4,08	0
Edhie Baskoro Yudhoyono	7	9	1,32	1,32	8,54	3,03
Herry Gunawan	5	6	8,82	8,82	6,95	6,29

Tabel 1. Hasil Pengukuran Sentralitas Jaringan Aktor
Sumber: Hasil Pengolahan Data Visone (2024)

Konsep	Frekuensi	Degree (%)	Indegree (%)	Outdegree (%)	Closeness (%)	Betweenness (%)
Danantara sedang dipersiapkan	14	11	7,97	7,97	4,57	1,29
Perubahan peraturan Danantara	9	6	4,34	4,34	3,85	0
Tujuan Danantara untuk mengelola aset	8	11	7,97	7,97	5,10	1,72
Peresmian Danantara ditunda	7	6	4,34	4,34	3,85	0
Pertimbangan Danantara sebagai <i>superholding</i>	6	7	5,07	5,07	4,30	6,66

Tabel 2. Hasil Pengukuran Sentralitas Jaringan Konsep
Sumber: Hasil Pengolahan Data Visone (2024)

Aktor/Konsep	Frekuensi	Degree (%)	Indegree (%)	Outdegree (%)	Closeness (%)	Betweenness (%)
Muliaman Hadad	35	7	6,03	6,03	2,89	6,63
Danantara sedang dipersiapkan	14	4	3,44	3,44	2,72	5,90
Perubahan peraturan Danantara	9	1	8,62	8,62	2,24	0
Tujuan Danantara untuk mengelola aset	8	3	2,58	2,58	3,09	7,27
Erick Thohir	8	5	4,31	4,31	2,89	5,66

Tabel 3. Hasil Pengukuran Sentralitas Jaringan Afiliasi
Sumber: Hasil Pengolahan Data Visone (2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengelaborasi beberapa temuan menarik. Pertama, penundaan peresmian BPI Danantara menjadi arena pertarungan koalisi wacana yang memunculkan wacana dominan melalui penggunaan metafora “*superholding*”. Wacana juara ini mampu menjembatani berbagai koalisi wacana, baik pro maupun kontra. Dari sisi koalisi wacana pendukung, wacana-wacana yang mengemuka seperti “Danantara sedang dipersiapkan” dan “Perubahan peraturan Danantara”. Kedua wacana mendukung penundaan peresmian BPI Danantara dengan alasan kehati-hatian dan pentingnya mempersiapkan regulasi yang matang. Di sisi koalisi wacana penolak, wacana yang muncul berupa kritik “Keraguan pemerintah atas peluncuran Danantara” dengan menggarisbawahi isu ketidakefisienan dan ketidakpastian konsolidasi BUMN yang hendak dilakukan pemerintah.

Kedua, pertarungan koalisi wacana-wacana tersebut berhasil mengikutsertakan berbagai aktor utama, seperti akademisi, DPR, Pemerintah, partai politik, praktisi ekonomi, pengamat, hingga masyarakat umum. Aktor-aktor utama lebih didominasi dari pihak Pemerintah yang mendukung penundaan peresmian BPI Danantara, seperti Erick Thohir dan Muliaman Hadad. Keduanya memainkan peranan penting dalam membentuk narasi-narasi pro-penundaan, khususnya narasi “*superholding*”, sehingga dapat memenangkan pertarungan wacana. Sebaliknya, aktor-aktor utama yang menolak muncul dari kritikan

pengamat ekonomi, Yanuar Rizky dan Hari Purwanto, yang menggarisbawahi tantangan teknis dan kelemahan konsolidasi BUMN. Menariknya, ditemukan wacana aktor “Pandu Sjahrir” yang terisolasi dengan koalisi-koalisi wacana lainnya dalam jaringan. Teori *Discourse Coalition Framework* (DCF) telah mampu membuktikan bahwa kebijakan publik tidak selalu dipengaruhi oleh fakta teknis semata, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor dalam membangun dan mengarahkan wacana demi meraih dukungan, terutama melalui penggunaan metafora yang persuasi dan pragmatis.

Sebagaimana keterbatasan teori DCF dan metode DNA sebelumnya, penelitian ini memiliki kelemahan dalam mengeksplorasi relasi para aktor utama yang telah berhasil diidentifikasi. Apalagi pertarungan wacana ini masih akan terus berlanjut, bahkan setelah BPI Danantara telah resmi diluncurkan. Maka, penelitian selanjutnya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menilik konsistensi koalisi wacana yang terjalin setelah BPI Danantara terbentuk. Apakah masih merujuk pada wacana dan aktor-aktor yang sama, atau berubah menjadi cair mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Untuk strategi komunikasi BPI Danantara ke depan dapat mengembangkan narasi-narasi turunan penggunaan wacana “*superholding*” untuk memenangkan pertarungan koalisi wacana berikutnya. Sehingga untuk melengkapi teori DCF, pendekatan naratif melalui gaya penceritaan (*storytelling*) pada suatu merek

perusahaan (*corporate brand*) perlu dikonstruksi secara maksimal dalam kacamata pemangku kepentingannya. Sementara untuk memperkaya penggambaran struktur jaringan secara teoritis dan metodologis, penelitian ke depan perlu mendalami secara kualitatif menggunakan pisau teori ACF dan metode analisis jaringan sosial terhadap temuan-temuan aktor utama ataupun pendukung yang berhasil diidentifikasi, seperti apa kekuatan atau pengaruhnya, sumber-sumber daya yang dimiliki, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. (2025). *Tiga Bulan Tertunda, Peluncuran Danantara Akhirnya Diresmikan Prabowo Besok*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/tiga-bulan-tertunda-peluncuran-danantara-akhirnya-diresmikan-prabowo-besok-1211073>
- Al-Yamani, Z. (2024, November 21). Penundaan Rencana Pembentukan BPI Danantara Jadi Sorotan. *Viva.Co.Id*.
https://www.viva.co.id/trending/1773864-penundaan-rencana-pembentukan-bpi-danantara-jadi-sorotan#goog_rewarded
- Aladdin, Y., & Hanafi, D. (2023). Memaknai Pemberitaan Wacana Hukuman Mati Koruptor pada Media Republika. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 13(2), 133–146.
<https://doi.org/10.35814/coverage.v13i2.4380>
- Amrihani, H. A., Eriyanto, & Zulkifli, M. Y. (2024). Debate on Rice Import Policy in Indonesia: Discourse Network Analysis in Online Media. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 9(1), 118–131.
<https://doi.org/10.25008/jkiski.v9i1.1051>
- Haresti
- Blum, S., & Kuhlmann, J. (2019). Stories of How to Give or Take—towards a Typology of Social Policy Reform Narratives. *Policy and Society*, 38(3), 339–355.
<https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1657607>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- danantaraindonesia.com. (2025). *Tentang Danantara Indonesia*.
<https://www.danantaraindonesia.com/>
- Elislah, N. (2023). Discourse Network Analysis on Delaying Elections in President Joko Widodo's Era. *Jurnal ASPIKOM*, 8(2), 225–240.
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1255>
- Eriyanto. (2014). *Analisis Jaringan Komunikasi*. Kencana.
- Eriyanto. (2022). *Analisis Jejaring Wacana: Konsep, Metode, dan Aplikasi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi, Politik, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Gayati, M. D. (2024). Prabowo Luncurkan BP Investasi Danantara pada 8 November Mendatang. *Antaranews.Com*.
https://www.antaranews.com/berita/4427321/prabowo-luncurkan-bp-investasi-danantara-pada-8-november-mendatang#google_vignette
- Global SWF. (2025). *Global SWF Ranking: Latest Updated August 2025*.
<https://globalswf.com/ranking>
- Goodwin, D., Raffin, M., Jeffrey, P., & Smith, H. M. (2018). Evaluating Media Framing and Public Reactions in the Context of a Water Reuse Proposal. *International Journal of Water Resources Development*, 34(6), 848–868.

- <https://doi.org/10.1080/07900627.2017.1347085>
- Guo, V., & Velentina, R. A. (2025). Sovereign Wealth Fund (SWF) Institution: Roles and Challenges of the Indonesia Investment Authority (INA). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(6), 120–129. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i6.7963>
- Hajer, M. (2002). Discourse Analysis and the Study of Policy Making. *European Political Science*, 2(1), 61–65. <https://doi.org/10.1057/eps.2002.49>
- Hajer, M. A. (1993). Discourse Coalitions and the Institutionalization of Practice: The Case of Acid Rain in Britain. In F. Fischer & J. Forester (Eds.), *The Argumentative Turn in Policy Analysis & Planning* (pp. 43–76). Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1220k4f>
- Hanych, M., Smekal, H., & Benák, J. (2023). The Influence of Public Opinion and Media on Judicial Decision-Making: Elite Judges' Perceptions and Strategies. *International Journal for Court Administration*, 14(3), 1–19. <https://doi.org/10.36745/IJCA.528>
- Hassapni, W., & Kurniawan, R. (2020). Kajian Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Dengan Discourse Network Analysis. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 49–58. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.115>
- Johan, S. (2022). Corporate Governance Principles in Sovereign Wealth Fund: The Case of Indonesia Sovereign Wealth Fund. *Journal The Winners*, 23(1), 65–71. <https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7293>
- Kasih, P. C. (2023). Pertarungan Wacana Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dalam Media Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(1), 19–34. <https://doi.org/10.52423/jkuho.v8i1.15>
- Khanya, R. (2024). Influence of Media Framing on Public Perception of Climate Change. *Journal of Communication*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.47941/jcomm.1972>
- Komala, R. (2024). Jejaring Wacana pada Debat Kebijakan Publik di DPR RI: Isu Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Komunikasi Global*, 13(1), 175–198. <https://doi.org/10.24815/jkg.v13i1.36954>
- Leifeld, P. (2020). Policy Debates and Discourse Network Analysis: A Research Agenda. *Politics and Governance*, 8(2), 180–183. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.3249>
- Markard, J., Rinscheid, A., & Widdel, L. (2021). Analyzing Transitions Through the Lens of Discourse Networks: Coal Phase-out in Germany. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 40, 315–331. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.08.001>
- Nowacki, C. E., Monk, A., & Decoster, B. (2020). Who Do Sovereign Wealth Funds Say They Are ? Using Structural Topic Modeling to Delineate Variegated Capitalism in Their Official Reports. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(4), 1–30. <https://doi.org/10.1177/0308518X20951808>
- Pasandaran, C. C., Primadani, I., Choirisa, S. F., & Yasak, E. M. (2024). Consent, Not Content, as the Central Discourse of Campus Sexual Violence Regulation. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 15(1), 24–34. <https://doi.org/10.35814/coverage.v15i1.6281>
- Putri, M. P. D. G., Murtiningsih, B. S. E., & Juliadi, R. (2023). Discourse Network Analysis pada Stakeholder dan Integrated Value Creation dalam CSR Bank Mandiri. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(2), 256–

274.
<https://doi.org/10.25139/jkp.v7i2.5998>
- Saputra, A. F. (2024). The Role of Social Media in Building Political Discourse: Political Polarization, UU ITE and Echo Chambers. *Ijtihad*, 40(1), 68–74.
- Shawoo, Z., Maltais, A., Dzebo, A., & Pickering, J. (2023). Political Drivers of Policy Coherence for Sustainable Development: An Analytical Framework. *Environmental Policy and Governance*, 33(4), 339–350.
<https://doi.org/10.1002/eet.2039>
- Soemekto, I. (2024, November 18). BPI Danantara, antara Harapan dan Tantangan. *Kompas.Id*.
<https://www.kompas.id/artikel/bpi-danantara-antara-harapan-dan-tantangan>
- Sofia, H. (2024, November 7). BP Danantara dan Penantian Transformasi Besar BUMN. *Mataram.Antaranews.Com*.
<https://mataram.antaranews.com/berita/392673/bp-danantara-dan-penantian-transformasi-besar-bumn>
- Sovereign Wealth Fund Institute. (2024). *Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets*.
<https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund>
- Supran, G., & Oreskes, N. (2021). Rhetoric and Frame Analysis of ExxonMobil’s Climate Change Communications. *One Earth*, 4(5), 696–719.
<https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.04.014>